

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN
GAYAMSARI KOTA SEMARANG**

Rafika Yolanita, Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The government has established a prospect family program as one of the poor handling efforts. However, the implementation of prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang is still not able to run effectively because it is still found the area that has many receivers outside the household is very poor, high graduations capable, and high Percentage of funds that have not been extended. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of the prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang. The method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the theories of Makmur, Campbell, and Nugroho about the criteria of program effectiveness, that is the accuracy of the goals, the accuracy of the objectives, satisfaction with the program, and the accuracy of the implementer. The results of this study indicate that the effectiveness of the family expectation program in terms of targeting accuracy, goal accuracy, and program satisfaction has not been effective, because there are still obstacles in its implementation, while the accuracy of the implementers has been able to run well. This is influenced by inhibiting factors such as the absence of an MoU, the emergence of social jealousy, KPM behavior that does not carry out its obligations, excessive co-worker workload, and poor quality system. The recommendation is to improve the socialization of the program, create a memorandum of understanding that governs cooperation between stakeholders, increased employment of KPM obligations, the addition of escort personnel, and improve the system PKH reports.

Keywords : *effectiveness, prospect family program, poverty alleviation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar 25,95 juta penduduk. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan masih belum berhasil. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan suatu upaya dengan membentuk kebijakan atau program yang dapat membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah Program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang diatur dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Program PKH sudah ada sejak tahun 2007, namun oleh Kementerian Sosial program PKH di Kota Semarang baru dilaksanakan pada akhir tahun 2013. Kota Semarang menjadi kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak se-Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 73.600 jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang membuat pemerintah perlu melakukan tindakan penanganan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Kota Semarang merupakan kota dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH terbanyak diantara keenam kota se-Jawa Tengah lainnya, yaitu sebesar 25.856 jiwa.

Berdasarkan ketentuan, kelompok warga yang berhak menjadi peserta PKH ialah kelompok Desil I, hal ini dikarenakan pada kelompok ini tingkat kemiskinan lebih parah dibandingkan dengan tingkat lainnya. Namun pada kenyataannya, terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat yang masuk kedalam katagori

Desil 1 dengan KPM PKH di Kota Semarang. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Selisih Jumlah Desil 1 dan KPM PKH
Kota Semarang 2019

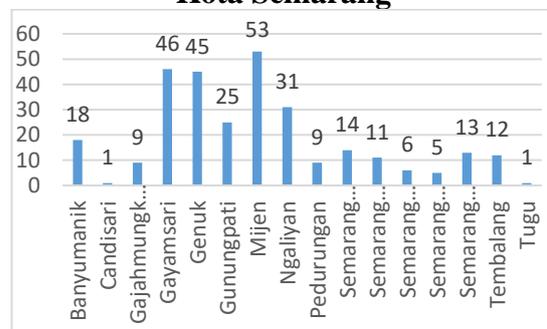
Kecamatan	Jumlah Desil 1	Jumlah KPM	Selisih
Banyumanik	2147	1448	699
Candisari	2361	1543	818
Gajahmungkur	1532	664	868
Gayamsari	563	1432	-869
Genuk	936	2035	-1099
Gunungpati	1557	2049	-492
Mijen	2937	1654	1283
Ngaliyan	2266	1361	905
Pedurungan	2629	2111	518
Semarang Barat	1608	2280	-672
Semarang Selatan	2002	859	1143
Semarang Tengah	3216	949	2267
Semarang Timur	1034	1743	-709
Semarang Utara	2293	2665	-372
Tembalang	497	2414	-1917
Tugu	1240	386	854
Jumlah	28818	25593	

Sumber: diolah dari data Bappeda Kota Semarang 2019

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ditemukan sejumlah 9.355 KK yang termasuk kedalam Desil 1 tetapi tidak termasuk kedalam Keluarga Penerima PKH. Selain itu terdapat pula sejumlah 6.130 KK penerima PKH yang berasal dari luar kelompok Desil I. Data KPM PKH pada dasarnya sangat dinamis, karena pemutakhiran data dilakukan secara rutin hampir setiap hari.

Pada tahun 2019, dinas sosial Kota Semarang sedang berupaya mengencarkan tingkat graduasi guna memaksimalkan ketepatan program. Graduasi merupakan proses pengakhiran bantuan dana PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya syarat kepesertaan baik dari segi kriteria ataupun segi sosial ekonomi. Graduasi mampu merupakan proses pengakhiran PKH yang dilakukan oleh petugas PKH karena dianggap telah mampu secara ekonomi dan tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dana PKH. Pada kenyataannya, tingginya graduasi katagori mampu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat secara sengaja membuat dirinya terlihat miskin sehingga dapat memperoleh bantuan melalui program keluarga harapan. Tingkat graduasi mampu di Kota Semarang dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
Jumlah Graduasi Mampu KPM PKH
Kota Semarang



Sumber : data diolah dari Rekap Graduasi KPM PKH Dinas Sosial Kota Semarang 2017-2019

Grafik 1.1 menjelaskan bahwa tingkat Graduasi katagori mampu pada setiap kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kecamatan Gayamsari merupakan kecamatan yang berada pada posisi kedua setelah mijen, yaitu sebesar 46 graduasi. Ketidaktepatan sasaran KPM ini tentunya merugikan sehingga masyarakat yang masuk kedalam katagori rumah tangga sangat miskin tidak dapat menerima haknya.

Apabila meninjau dari penyaluran dana KPM PKH di kota Semarang, masih banyak kecamatan yang memiliki persentase tinggi KPM PKH yang belum menerima dana bantuan. Hal ini dapat diketahui pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Persentase Dana PKH Yang Belum Tersalurkan Kota Semarang

Kecamatan	KPM PKH	Dana Tersalurkan	Persentase Dana Belum Tersalurkan
Banyumanik	1512	963	36%
Candisari	1612	966	40%
Gajahmungkur	718	356	50%
Gayamsari	1570	888	43%
Genuk	2167	1450	33%
Gunungpati	2179	1345	38%
Mijen	1783	1167	35%
Ngaliyan	1458	916	37%
Pedurungan	2208	1369	38%
Semarang Barat	2412	1389	42%
Semarang Selatan	926	606	35%
Semarang Tengah	1016	713	30%

Kecamatan	KPM PKH	Dana Tersalurkan	Persentase Dana Belum Tersalurkan
Semarang Timur	1860	1213	35%
Semarang Utara	2800	1708	39%
Tembalang	2591	1931	25%
Tugu	412	265	36%

(Sumber : data diolah dari Rekap KPM PKH Dinas Sosial Kota Semarang dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/01/2018)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Kecamatan Gayamsari merupakan wilayah kecamatan yang memiliki tingkat persentase dana tersalurkan terbesar kedua setelah Kecamatan Gajahmungkur, yaitu sebesar 43%. Sebanyak 682 KPM PKH di Kecamatan Gayamsari masih belum mendapatkan dana bantuan. Pelaksanaan PKH dinilai masih dikatakan belum efektif karena belum dapat mencapai tujuan dari PKH itu sendiri dimana dana PKH belum dapat tersalurkan dengan tepat waktu.

Permasalahan yang kompleks di Kecamatan Gayamsari ditinjau dari banyaknya jumlah penerima PKH yang diluar Desil I, tingginya jumlah graduasi katagori mampu, serta penyaluran dana yang tidak tersampaikan ke KPM PKH membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari, apakah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan efektif atau belum, serta faktor pendukung dan penghambat apa saja

yang ada dalam efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

.Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan (George J. Gordon dalam Syafiee, 2010:25). Administrasi publik memiliki ruang lingkup dimana salah

satunya merupakan manajemen publik. Robert T. Golembiewski menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu administrasi publik perlu menekankan kepada *focus* dan *locus*. Fokus diartikan sebagai memperlihatkan hal yang dipelajari dari bidang studi tersebut, sedangkan *locus* lebih memperhatikan kepada tempat dari bidang studi tersebut (sugandi, 2011:10).

2. Manajemen Publik

Menurut G.R. Terry (dalam Syafiee, 2010:49) menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kemunculan manajemen publik sebagai keilmuan berasal dari pemikiran organisasi sektor publik yang fokusnya adalah internal organisasi, yaitu megatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan. Namun, organisasi sektor publik juga tidak lepas dari realitas eksternal ang selalu dipengaruhi kebijakan publik dan kepentingan publik (Wijaya dan Danar, 2014:1). Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua unsur yang terdapat dalam ilmu admnistrasi publik.

Definisi manajemen publik menurut Ovrman (Pasolong, 2010:83) merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik di sisi lain.

3. Efektivitas Program

Efektivitas program dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang didapat pada kenyataannya. Apabila dalam pelaksanaan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan yang menghasilkan target atau tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka program tersebut dikatakan tidak efektif. Menurut Campbell J.P (dalam Starawaji, 2009) terdapat indikator efektivitas secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap Program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur (2011:7) adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan perhitungan biaya
2. Ketepatan berpikir
3. Ketepatan tujuan

4. Ketepatan sasaran.

Pendapat Makmur juga selaras dengan pendapat Riant Nugroho (2012:707-710) yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Ketetapan program
2. Ketepatan pelaksana
3. Ketepatan target
4. Ketepatan lingkungan
5. Ketepatan proses

Teori efektivitas program apabila disimpulkan dapat dirumuskan sebagai suatu tolak ukur dalam menilai hasil pelaksanaan suatu program dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4. Faktor yang Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondineli (Dalam Mutiarin Dyah Dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program adalah sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu program yang mencakup lingkungan

- sosio kultural serta keterlibatan penerima program. Menurut Haedar Akib terdapat faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu faktor kebijakan dan faktor di luar kebijakan. Menurut Keban (dalam Akib, 2010) faktor diluar kebijakan terdiri dari kondisi sosial ekonomi dan teknologi, sikap dan sumberdaya yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen kepemimpinan pelaksana.
2. Sumber daya, yaitu sumber pendukung baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya nonmanusia pada pelaksanaan suatu program . Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Zaenal, 2017) sumberdaya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
 3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu mencakup struktur organisasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi suatu program.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah k=deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan populasi atau sampel/informan menjadi responden

penelitian berdasarkan pertimbangan, salah satunya pertimbangan responden yang dipandang paling mengetahui dalam mengungkap masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Semarang
2. Koordinator Pelaksana Program Kelurga Harapan (PPKH) di Kota Semarang
3. Kepala Seksi Sosial Kccamatan Gayamsari
4. Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari
5. 3 (tiga) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari

Jenis data yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber data tertulis dan foto. Sumbe data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analiis dan interpretasi data menggunakan analisis Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai alat untuk mengukur uji kredibilitas.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran diwujudkan dengan melakukan verifikasi calon KPM PKH telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih terjadi permasalahan dalam proses berjalannya PKH. Proses penerimaan PKH yang lama mengakibatkan banyak terjadi perubahan antara data yang diserahkan ketika mendaftar dengan data terbaru. Perubahan data tersebut tentunya menjadi permasalahan dimana keadaan KPM yang berbeda dengan data awal sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian antara realita ketepatan sasaran di kecamatan gayamsari dengan sasaran yang telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Perubahan aturan mengenai syarat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tentunya menuai banyak pertentangan dari masyarakat. Dengan demikian, hanya komponen kesehatan yang baru terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Disisi lain, komponen pendidikan dan

komponen kesejahteraan sosial masih belum dikatakan efektif.

2. Ketepatan Tujuan

Suatu program akan dikatakan efektif apabila telah terlaksanannya ketepatan tujuan. Tujuan *pertama* program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, keluarga penerima manfaat PKH tidak hanya diberikan bantuan berupa uang saja, tetapi keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan beras, gas, listrik, dan bantuan sosial lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan program keluarga harapan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial masih belum efektif. Hal ini dikarenakan 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Komponen kesehatan dan komponen pendidikan di kecamatan gayamsari masih belum bisa melakukan kewajiban serta tidak menggunakan dana sebagaimana mestinya yang berdampak pada ketidak tercapainya tujuan program keluarga harapan.

Tujuan program keluarga harapan *kedua* untuk mengurangi beban pengeluaran KPM serta dapat meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian, adanya PKH telah mampu mengurangi beban KPM PKH Kecamatan Gayamsari. Keberhasilan tujuan PKH dalam mengurangi beban tidak disertai dengan meningkatnya pendapatan keluarga penerima manfaat. Peningkatan pendapatan KPM PKH di Kecamatan Gayamsari dilakukan dengan cara membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) yang diharapkan dengan adanya kelompok usaha dapat meningkatkan pendapatan kelompok KPM. Namun upaya tersebut belum berjalan maksimal, karena kelompok usaha bersama (KUBE) belum dapat berjalan di kecamatan gayamsari. Akibatnya, KPM PKH masih belum dapat meningkatkan pendapatannya. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa tujuan PKH dalam mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan KPM PKH masih belum efektif.

Tujuan *ketiga* PKH adalah mengubah perilaku KPM menjadi lebih baik lagi serta membentuk KPM menjadi mandiri. Pada Kecamatan Gayamsari, perubahan perilaku dan kemandirian sangat lambat serta masih

ditemukan KPM PKH yang tidak bertanggungjawab pada kewajibannya. Selain itu, KPM PKH memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan kriterianya berakibat terciptanya perilaku yang buruk dilingkungan keluarga penerima manfaat. Perubahan perilaku dan kemandirian yang lambat menjadikan tujuan PKH belum bisa berjalan sesuai dengan rencana serta belum efektif dilaksanakan di Kecamatan Gayamsari.

Tujuan *keempat* PKH adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKH untuk mengurangi kemiskinan dianggap belum berhasil. Rumah tangga sangat miskin sebagai sasaran program keluarga sebanyak 84,11 % masih belum bisa mendapatkan program bantuan keluarga harapan dikarenakan belum terdaftar pada BDT. Selain itu sebanyak 60,68 % KPM PKH di Kecamatan Gayamsari berasal dari luar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dengan demikian, tidak berhasilnya program keluarga harapan dalam mengurangi kemiskinan menjadikan tujuan ini belum bisa efektif terlaksana di kecamatan gayamsari. Kesenjangan di Kecamatan Gayamsari juga menjadi tujuan program keluarga harapan. Namun

kesenjangan di kecamatan gayamsari masih belum bisa teratasi. Tidak tercovernya seluruh rumah tangga sangat miskin menciptakan kesenjangan, terutama antara KPM dengan keluarga yang masuk kedalam desil I. Program ini menciptakan keirian antar masyarakat karena merasa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan. Selain itu, jumlah bantuan hanya cukup digunakan untuk menunjang mendapatkan fasilitas sehingga bantuan PKH masih belum bisa mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di kecamatan gayamsari.

Tujuan terakhir PKH adalah mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Pada pelaksanaannya masih ditemukan KPM PKH yang belum memahami sistem perbankan sehingga belum mampu memahami penggunaan ATM sebagai alat penyaluran dana bantuan. KPM PKH yang belum mampu melakukan penggunaan ATM disebabkan minimnya pengetahuan akan jasa dan produk keuangan formal sehingga dalam mengakses sistem perbankan, KPM PKH takut melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, KPM PKH yang belum bisa menggunakan ATM akan dibantu oleh

pendamping PKH ataupun ketua kelompok PKH Kecamatan Gayamsari.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program keluarga harapan masih belum sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Makmur mengenai ketepatan tujuan yang efektif. Program keluarga harapan di kecamatan gayamsari masih memiliki beberapa permasalahan dalam mencapai ketepatan tujuan. Dengan demikian, ketepatan tujuan program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari masih belum efektif karena tujuan PKH masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

3. Kepuasan Program

Kepuasan program menjadi salah satu indikator dalam mengukur efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, kepuasan keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang masih belum sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Campbell. Hal ini dikarenakan masih terdapat keluarga penerima manfaat PKH yang mengalami terhambatnya penyaluran bantuan yang disebabkan oleh *errornya* ATM. Selain itu, prosedur

penetapan KPM PKH dinilai cukup memakan waktu yang lama serta penetapan KPM PKH yang dianggap tidak transparan mengenai kriteria khusus dalam penetapan keluarga penerima manfaat PKH. Disisi lain, pemerintah dianggap tidak tanggap dalam merespon permasalahan KPM, terutama permasalahan yang berkaitan dengan ATM. Dengan demikian, kepuasan program yang dirasakan keluarga penerima manfaat dinilai belum efektif.

4. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana merupakan salah satu indikator dalam mengukur efektivitas program keluarga harapan di kecamatan Gayamsari. Ketepatan pelaksana PKH di Kecamatan Gayamsari dilihat dari kerjasama antara Dinas sosial Kota Semarang dengan PPKH Kota Semarang sebagai pelaksana PKH. Selain itu, upaya dinas sosial kota semarang dan pendamping PKH Kecamatan gayamsari dalam memberikan layanan yang tepat menjadi ukuran dari ketepatan pelaksana program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari.

Berdasarkan hasil penelitian, dinas sosial dan PPKH telah menjalankan kerjasama dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Demi terbentuknya kerjasama yang baik, PPKH terus melakukan koordinasi dengan dinas sosial terkait PKH. Selain itu, dinas sosial juga bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan KPM yang tidak ingin dikeluarkan karena sudah tidak memiliki kriteria PKH. Tidak hanya bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan, dinas sosial dan pendamping PKH juga memiliki upaya dalam memberikan layanan yang tepat bagi KPM PKH. Dinas sosial berupaya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan KPM PKH. Disisi lain, pendamping PKH Kecamatan Gayamsari berupaya untuk memaksimalkan setiap P2K2 dengan memberikan materi untuk menambah wawasan KPM PKH serta membuka ruang terbuka untuk menyapaikan permasalahan yang dihadapi KPM PKH. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam memberikan pelayanan, ketepatan pelaksana PKH di kecamatan Gayamsari sudah efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama yang dilakukan tenaga kerja program keluarga harapan dalam koordinasi dan ketepatan sudah terlaksana karena kerjasama yang dijalankan oleh dinas sosial dan PPKH

Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, ketepatan pelaksana program keluarga harapan sudah dapat dikatakan efektif.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah elemen sistem dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu program. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan program keluarga harapan adalah tidak adanya nota kesepahaman atau MoU antara para stakeholders dalam memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat. Koordinasi antar stakeholders diterapkan dengan cara improvisasi, sehingga tidak adanya MoU menjadi salah satu penghambat kerjasama stakeholders dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Selain itu, kondisi lingkungan sosial ekonomi pada umumnya bermata pencaharian sebagai buruh. Pekerjaan buruh menjadi pekerjaan sebagian masyarakat kecamatan gayamsari, dimana pekerjaan buruh dibagi menjadi 2, yaitu buruh industri dan buruh bangunan, Kondisi ini

mempengaruhi penghasilan, dimana sebagian masyarakat gayamsari masuk kedalam katagori tidak mampu.

Terbatasnya kuota program keluarga harapan menimbulkan permasalahan, dimana masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar menjadi iri kepada KPM sehingga menciptakan kecemburuan sosial. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa terdapat beberapa KPM yang tidak layak mendapatkan bantuan PKH karena kondisinya tidak miskin sehingga kecemburuan sosial dikalangan masyarakat dan KPM menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat efektivitas program keluarga harapan adalah minimnya tenaga kerja pendamping dikarenakan jumlah KPM yang harus didampingi pendamping melebihi rata-rata, dimana rata-rata didaerah lain pendamping hanya mendampingi 150-200 KPM. Berbeda dengan jumlah KPM yang harus didampingi di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, yaitu

sebanyak 300 KPM. Perbedaan jumlah ini menimbulkan beban kerja yang dialami pendamping keluarga penerima manfaat di kecamatan gayamsari. Disisi lain, kredibilitas pendamping yang baik menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari. Pendamping PKH diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya sebelum memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat pada saat P2K2.

Sumber daya finansial juga menjadi salah satu faktor pendukung efektifitas. Program keluarga harapan mendapatkan dana anggaran yang cukup menciptakan kuota yang banyak pada KPM. Penambahan kuota penetapan keluarga penerima manfaat dipengaruhi oleh peningkatan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Selalin itu, daya serap anggaran juga telah terlaksana dengan baik, dimana setiap adanya penambahan anggaran akan selalu dilakukan validasi untuk menetapkan calon keluarga penerima manfaat yang baru.

Pada sisi sumber daya keluarga penerima manfaat juga menjadi salah

satu faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di kecamatan gayamsari. Ditemukannya keluarga penerima manfaat yang tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketetapan program keluarga harapan dan cenderung menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan lain. Selain itu, masih terdapatnya KPM yang tidak menjalankan kewajiban lainnya dengan cara tidak menghadiri pertemuan pada P2K2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Perilaku keluarga penerima manfaat yang kurang bertanggung jawab menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan.

3. Kemampuan Agen Pelaksana

Kemampuan agen pelaksana yaitu kemampuan agen pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Pendamping program keluarga harapan memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan pendamping program keluarga harapan di kecamatan gayamsari dalam melakukan P2K2, verifikasi, validasi, pemutakhiran data, serta penyaluran dana bantuan sudah

terlaksana dengan baik. Faktor yang mendukung terlaksananya kemampuan pendamping adalah pelatihan yang diberikan sebelum memberikan materi di P2K2 serta adanya modul yang sangat membantu terkoordinirnya penyampaian materi. Namun masih terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pemutakhiran data, dimana sistem yang digunakan untuk mempublikasi data-data keluarga penerima manfaat sering mengalami down. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pendamping yang mengakses sistem yang tidak sesuai dengan daya tampung sistem mengakibatkan terhambatnya kinerja pendamping.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang apabila dikaitkan dengan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Menunjukkan bahwa faktor yang menghambat efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah tidak adanya MoU kerjasama antar *stakeholders* dalam memberikan pelayanan, adanya kecemburuan sosial akibat minimnya transparansi, beban kerja yang ditanggung pendamping

PKH melebihi batas standar, kualitas sistem laporan yang kurang baik yang berakibat pada *server down*, keluarga penerima manfaat tidak menjalankan kewajibannya dalam menghadiri P2K2, serta KPM tidak bertanggungjawab pada penggunaan dana bantuan,. Sedangkan faktor pendukung efektivitas program keluarga harapan adalah kredibilitas pendamping dan dana anggaran program keluarga harapan

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang belum efektif, hal ini dilihat dari kriteria efektivitas program yang belum maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pertama dalam ketepatan sasaran, yaitu ketepatan sasaran pada komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masih belum berjalan dengan maksimal, karena syarat yang ditetapkan dilapangan berbeda dengan yang ada diperaturan serta lamanya proses penerimaan KPM PKH menimbulkan ketidaksesuaian

dengan data awal. Dengan demikian, ketepatan sasaran masih belum dikatakan efektif. Kedua adalah ketepatan tujuan, yaitu ketepatan pada 5 tujuan PKH antara lain meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan KPM yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengakses fasilitas layanan, penyalahgunaan dana bantuan, tidak adanya kegiatan kelompok dalam meningkatkan pendapatan, KPM tidak memiliki rasa tanggung jawab, rumah tangga sangat miskin yang terdaftar hanya 15,89 %, jumlah KPM PKH diluar desil 1 sebanyak 60,68 %, terciptanya kesenjangan sosial antara KPM dengan RTSM yang tidak diterima PKH, serta

KPM yang belum memahami produk dan jasa keuangan formal. Dengan demikian, ketepatan tujuan masih belum efektif. Ketiga adalah kepuasan program, yaitu kepuasan yang dirasakan keluarga penerima manfaat terhadap program keluarga harapan dinilai belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan prosedur penyaluran bantuan terhambat oleh *errornya* ATM, lamanya prosedur penetapan KPM PKH, penetapan KPM PKH yang tidak transparan, dan pemerintah tidak tanggap dalam merespon permasalahan KPM ATM. Dengan demikian, kepuasan program yang dirasakan keluarga penerima manfaat dinilai belum efektif. Terakhir adalah ketepatan pelaksana, yaitu kerjasama yang dilakukan tenaga kerja program keluarga harapan dalam koordinasi, perencanaan, dan ketepatan sudah terlaksana karena kerjasama yang dijalankan oleh dinas sosial dan PPKH Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, ketepatan pelaksana program keluarga harapan sudah dapat dikatakan efektif.

- b. Faktor yang menghambat efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah tidak adanya MoU kerjasama natar stakeholders, adanya

kecemburuan sosial, beban kerja yang berlebihan, KPM tidak menjalankan kewajibannya, serta kualitas sistem yang kurang baik. Sedangkan faktor pendukung efektivitas program keluarga harapan adalah kredibilitas pendamping dan dana anggaran program keluarga harapan.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas program keluarga harapan di kecamatan gayamsari, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memaksimalkan ketepatan sasaran, maka perlu dilakukan sosialisasi terkait perubahan syarat ketentuan sehingga terjadinya ketepatan sasaran yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Untuk memaksimalkan ketepatan tujuan, maka perlu meningkatkan pengawasan pada KPM untuk menjalankan kewajibannya, meningkatkan kemampuan KPM untuk lebih produktif, meningkatkan jumlah RTSM di BDT, serta meminimalisir kuota PKH diluar RTSM.
 - c. Untuk memaksimalkan kepuasan program, maka perlu meningkatkan prosedur penyaluran

dana bantuan, meningkatkan transparansi penetapan KPM, serta meningkatkan ketanggapan pemerintah dalam membantu permasalahan yang dihadapi KPM.

- d. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksana, maka perlu ditingkatkan kerjasama yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kepuasan keluarga penerima manfaat.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian efektivitas program keluarga harapan di kecamatan gayamsari, berkaitan dengan lingkungan , karakteristik sosial, karakteristik agen pelaksana, maka perlu pembuatan MoU kerjasama antar stakeholders, pengurangan beban kerja dengan menambah jumlah pendamping, meningkatkan pengawasan, perilaku tegas yang harus dimiliki pendamping serta meningkatkan sistem PKH dalam melakukan pemutakhiran akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kencana, Inu Syafiiie, 2016, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Keban, Yeremias, 2014, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Tiga, Yogyakarta, Gava Media

- Mukarom, Zaenal, dan Laksana, 2015, Manajemen Pelayanan Publik, Bandung, CV Pustaka Setia
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta
- Steers, M. Richard, 1985, Efektivitas Organisasi, Jakarta, Erlangga
- Suwitri, Sri, 2008, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wijaya, Andy Fefta, dan Danar, Oscar Radyan, Manajemen Publik Teori dan Praktik, Malang, Universitas Brawijaya Press
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis**
- Apando Ekardo, Firdaus, Nilda Elfemi, 2014, Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan, Nomor 1, Volume III, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatra Barat
- Eni Ardianti, Rumzi Samin, Edison, 2017, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tantungpinang, Universitas Maritim Raja Haji Ali
- Firdaus, Khonita, TAHUN, Efektifitas Layanan *Mobile Application "mLibrary"* di Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada
- Indriyani, Firma Kusuma, 2014, Efektifitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun , Univesitas Negeri Surabaya
- Ibnu, Muhammad Ristiawan, 2019, Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Pertamina Di Tambakrejo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Universitas Diponegoro
- Irfani, Intania, dan F. Winarni, 2018, Efektivitas Program Kota Tanpa Kmuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta
- Kolesnik Elena, Larisa Pavlova, Tatyana Rybalova, 2018, Effectiveness Evaluation Of Implementation Of Target Programs For Municipal Education: Improvement Of Approaches, Tyumen State University
- Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto , 2017 Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол), Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 6, Nomor 2, Universitas Diponegoro
- Najidah, Nurul, Hesti Lestari, 2019 Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kora Semarang, Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 8, Nomor 2, Universitas Diponegoro
- Neera Shrestha Pradhan, Yufang Su, Yao Fu, Liyun Zhang, Yongping Yang, 2017, Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009–2010 Drought in Yunnan Province, China Spinger

Regulasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga
Harapan

Lainnya

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Direktorat Jenderal Perlindungan
Dan Jaminan Sosial Kementerian
Sosial RI, 2017, Pedoman Umum
Program Keluarga Harapan (PKH)

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial Nomor
01/LJS/01/2018